



RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Samarinda

Jl. Sentosa Dalam No. 01 Kelurahan
Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Sungai Pinang Kota Samarinda



  @BPBDSamarinda

magnificent
SAMARINDA

0811-5537-007 

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan tahun Terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2026 nanti juga akan dilaksanakan sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, 01 Maret 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Landasan Hukum.....	13
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2025	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA BPBD Kota Samarinda.....	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	47
2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	67
3.3 Program dan Kegiatan	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	81
BAB V PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah ***”Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
 - f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 - j. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana ;
 - l. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

- m. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- n. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana ;
- t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
- v. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- w. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penggulangan Bencana ;
- x. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- y. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- ö. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- ff. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor : 0199/M/PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK/07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- gg. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- hh. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- ll. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
- mm. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
- nn. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

- (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- oo. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- pp. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- qq. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- rr. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ss. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- tt. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
- uu. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- vv. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- ww. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penanggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kota Samarinda dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kota Samarinda yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-

2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPBD Kota Samarinda Tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPBD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja beserta target capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 beserta pagu indikatif anggaran nya di tahun 2024 yang akan datang mengenai program dan kegiatan nya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA SAMARINDA

Rencana Kerja BPBD Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Samarinda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berupaya memenuhi beberapa sasaran kinerja yang sudah direncanakan di dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana
2. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatnya pelayanan pasca bencana

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) BPBD Kota Samarinda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.01		Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana			4 Jenis			1			3		4			100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		0		239,600,000		0	0	53938140		158970446		212,908,586		212,908,586	100	88.86
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.01	3	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen			1					1				100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		0		268,600,000		0	0	184700000		45166741		229,866,741		229,866,741	83.33	85.58
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.01	4	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			300 Orang			50			200		250				83.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				91.67	87.13	
Predikat Kinerja																				ST	T	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4,081,450,263		5,758,110,704		204,311,976	412,502,162	1,327,804,808		3,115,211,405		5,059,830,351		9,141,280,614	88.89	87.87
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02		Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan			9 Jenis			1			6		7				77.78	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	84,974,900		949,593,054		0	0	0		878921222		878,921,222		963,896,122	80	92.56
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			5 Kawasan			1			3		4				80	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	6	21,032,750		250,000,000		0	13580500	65700000		139603495		218,883,995		239,916,745	81.82	87.55
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	8	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			11 Orang			3			6		9				81.82	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	1	196,835,281		250,000,000		0	0	75268357		122562391		197,830,748		394,666,029	100	79.13
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	9	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0			2		2				100	

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		99	1,042,306,249		831,474,650		0	20530000	47230245	466757298	534,517,543	1,576,823,792	75	64.29
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	10		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			500 Orang			125		250		375		75	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0	0		250,000,000		0	0	22678035	189561140	212,239,175	212,239,175	100	84.9
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	11		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0		2		2		100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		2	47,782,400		230,000,000		0	36462500	64300000	48501510	149,264,010	197,046,410	61.02	64.9
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	12		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			59 Keluarga			12		24		36		61.02	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			0		1,200,000,000		0	41947759	676897630	460040447	1,178,885,836	1,178,885,836	100	98.24
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	13		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			12 Dokumen			3		9		12		100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0		250,000,000	10216976	17162955	17159120	196740921	241,279,972	241,279,972	100	96.51	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	14		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen			1			1			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			0		387,043,000		0	138659124	167410000	70926928	376,996,052	376,996,052	100	97.4
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	15		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			10 Unit			5		5		10		100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			0		350,000,000		0	0	22121500	245043019	267,164,519	267,164,519	80	76.33
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	16		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			100 Orang			25		55		80		80	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			0		810,000,000	194095000	144159324	169039921	296553034	803,847,279	803,847,279	100	99.24	

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.02	17	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1											100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				88.89	87.87
Predikat Kinerja																				T	T
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1,952,938,556	2,297,484,733	7,125,000	125,136,600	935,331,108	1,122,049,593	2,189,642,301	4,142,580,857	56.11	95.31			
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03		Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		5 Jenis				1		1	2					40	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1		15,274,000	35,500,000	0	0	2750000	8678800	11,428,800	26,702,800	100	32.19			
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	1	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		1 Laporan			0		1		1					100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1		36,770,000	94,000,000	0	14860000	21726437	32300893	68,887,330	105,657,330	100	73.28			
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	2	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen			1			1						100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1		1,570,605,416	1,173,000,000	4375000	14960000	391000931	748959900	1,159,295,831	2,729,901,247	3.33	98.83			
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		3000 Orang			100			100						3.33	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	813,191,733	1750000	67566600	465786634	261756000	796,859,234	796,859,234	33.33	97.99				
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	9	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1500 Orang			500			500						33.33	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		0	88,793,000	1000000	27750000	18267106	28062000	75,079,106	75,079,106	100	84.56				

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	10		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			1 Dokumen		1					1				100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	93,000,000		0	0	35800000	42292000		78,092,000		78,092,000		0	83.97	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.03	11		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1 Laporan						0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				56.11	95.31	
Predikat Kinerja																				R	ST	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1,131,866,034	1,542,196,841		3,535,000	284,689,172	555,536,585	515,757,224		1,359,517,981		2,491,384,015		47.22	88.15	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04			Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			5 Jenis		1		1		2					40	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		2 65,533,142	134,501,000		0	18627626	13725000	75157500		107,510,126		173,043,268		50	79.93	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	1		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			2 Dokumen		1				1					50	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		2 38,359,000	181,500,000		0	2785000	74170000	52489300		129,444,300		167,803,300		100	71.32	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	2		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Dokumen		0		1		1					100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	3	KERJA Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1 44,394,386	74,000,000		0	11522500	0	36685000		48,207,500		92,601,886		33.33	65.15	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	3		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			3 Dokumen		1				1					33.33	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1 97,357,050	160,291,246		0	0	14296453	110451000		124,747,453		222,104,503		0	77.83	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	4		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen		0				0					0	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		0	37,600,000		0	0	24780000	945000		25,725,000		25,725,000		0	68.42	

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan		0	0			4		4			100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100	74.73	
Predikat Kinerja																				ST	S	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,535,496,020	6,235,740,425		1,375,467,836	1,605,264,956	1,616,816,640		1,621,378,636		6,218,928,068		11,754,424,088	100	99.73	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02			Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan			7 Laporan		3	3		1		7			100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		36	4,877,596,790	5,435,272,428	1211667836	1352284956	1552243777		1320124898		5,436,321,467		10,313,918,257	100	100.02	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan		9	9		36		36		100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		18	614,415,508	750,467,997	163800000	234380000	54459363		283960787		736,600,150		1,351,015,658	100	98.15	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		3	3		6		12		100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	43,483,722	50,000,000		0	18600000	10113500	17292951		46,006,451		89,490,173	100	92.01	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan		1	1		3		5		100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100	99.73	
Predikat Kinerja																				ST	ST	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,050,087,017	737,437,050		6,260,000	258,211,675	167,748,305		199,305,124		631,525,104		2,681,612,121	90.53	85.64	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06			Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum				19 Laporan		0	1		18		19		100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	9,240,000	9,990,670		0	0		3497500		3,497,500		12,737,500	100	35.01	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket		0	2		3		5		100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	1,697,282,400	375,225,410		0	229505000	69820000	69959500		369,284,500		2,066,566,900	100	98.42	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket		0	12		4		16		100		

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	39,106,000	42,517,500	0	0	12430000	23550000	35,980,000	75,086,000	100	84.62
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			27 Paket	0	7	20	27			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	40,703,880	27,998,470	0	9393450	4000000	14470200	27,863,650	68,567,530	100	99.52
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	0	1	1	2			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	11,724,250	12,000,000	0	0	0	5059000	5,059,000	16,783,250	68.18	42.16
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			22 Laporan	0	5	10	15			68.18	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	252,030,487	269,705,000	6260000	19313225	81498305	82768924	189,840,454	441,870,941	75	70.39
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	1	2	6	9			75	
Rata-rata capaian kinerja (%)																90.53	85.64
Predikat Kinerja																T	T
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,292,475,828	265,650,000	0	0	181,155,468	80,740,000	261,895,468	1,554,371,296	100	98.59
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07		Laporan Rencana Kebutuhan Barang			4 Unit	0	1	3	4			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	931,475,828	243,350,000	0	0	181155468	59040000	240,195,468	1,171,671,296	100	98.7
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0	1		1			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		0	22,300,000	0	0	0	21700000	21,700,000	21,700,000	100	97.31
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			13 Unit	0	0	13	13			100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	98.59
Predikat Kinerja																ST	ST
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		117,642,363	107,908,948	28,072,694	19,562,303	17,589,994	38,756,381	103,981,372	221,623,735	100	96.36
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08		Laporan Penyediaan Jasa			136 Laporan	3	34	99	136			100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	97,642,363	79,508,948	28072694	16562303	15339994	16075381	76,050,372	173,692,735	100	95.65

1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan		9		9			18		36			100		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		89	20,000,000		28,400,000		0		3000000		2250000		22681000		27,931,000	47,931,000	100	98.35
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		3		3			6		12				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	96.36		
Predikat Kinerja																					ST	ST		
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			563,582,560		559,444,000		0		0		135,067,946		354,996,950		490,064,896	1,053,647,456	93.33	87.6
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09			Laporan Pemeliharaan			16 Laporan		4		4			8		16				100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		222,855,000		0		0		41552750		119548154		161,100,904	161,100,904	80	72.29
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			30 Unit		7		7			10		24				80	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7	528,648,560		316,589,000		0		0		89986196		223415796		313,401,992	842,050,552	100	98.99
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit		2		2			6		10				100	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	34,934,000		20,000,000		0		0		3529000		12033000		15,562,000	50,496,000	100	77.81
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	5	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		0		1					1				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					93.33	87.6		
Predikat Kinerja																					ST	T		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																					97.31	96.91		

Predikat Kinerja									ST	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	0	1,624,772,506	0	2,709,140,368	0	5,220,840,594	0	7,352,858,346	16,907,611,814		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										84.14	92.84
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										T	ST

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (Output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Kegiatan)	Target
1	Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	330 Orang
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen

		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Kegiatan
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang	25 Orang

		berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan
		Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis

	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan
	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis

		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan

Ke-29 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

B. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Kegiatan)	Target
1	Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	330 Orang
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Kegiatan
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk	500 Orang

		menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	25 Orang
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen

	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan
	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	500 Orang

	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan
	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana	10 Kegiatan

		Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	
--	--	--	--

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Melihat capaian tahun 2024 BPBD Kota Samarinda optimis dapat merealisasikan seluruh kegiatan dengan baik. Untuk tahun berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2025 dengan usulan sebesar Rp. 15.291.680.123,- terurai dalam 2 program, 11 kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kota Samarinda **"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"** melalui lima pokok aspek yaitu *Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kota, Pemerintahan, Infrastruktur dan Lingkungan Kota*. pada dasarnya Kegiatan BPBD Kota Samarinda Mendukung Misi Kelima Kota Samarinda, Untuk mencapai Misi ketiga tersebut BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan bencana di Kota Samarinda baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80	8.604.300.674,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	159.368.181,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.368.181,00

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54 Orang	6.802.180.826,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	5.995.899.826,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	756.281.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Orang	130.000.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 Paket	85.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	45.000.000,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39 Laporan	530.251.667,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	15.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	200.000.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Paket	25.251.667,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.000.000,00
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	22 Laporan	30.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	10.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	1 Unit	10.000.000,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	250.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	150.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100.000.000,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Laporan	722.500.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	500.000.000,00

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	70.000.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	112.500.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	40.000.000,00
B	Program Penanggulangan Bencana	0,69	6.510.000.000,00
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	600.000.000,00
1	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	330 Orang	280.000.000,00
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	320.000.000,00
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Jenis	4.040.000.000,00
1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	300.000.000,00
2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Unit	550.000.000,00
3	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	500 Orang	450.000.000,00
4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	400.000.000,00
5	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	7 Kawasan	450.000.000,00
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	250.000.000,00
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	300.000.000,00
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00
9	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	630.000.000,00
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	330.000.000,00
11	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	6 Kawasan	280.000.000,00
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	875.000.000,00
1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	1 Laporan	75.000.000,00

2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500 Orang	200.000.000,00
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	500 Orang	350.000.000,00
5	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1 Dokumen	100.000.000,00
6	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis	1.177.825.000,00
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00
2	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	225.000.000,00
3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00
4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	250.000.000,00
5	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	250.000.000,00

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda Sebagai berikut :

- a. Rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan diseluruh wilayah Kota Samarinda
- b. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda dalam pencapaian indikator kinerja BPBD Kota Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, maka Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas isu strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap isu internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana

Kebijakan :

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana

2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penganggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

Kebijakan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Strategi :

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penanggulangan bencana
2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan :

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana**Strategi :**

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Memperkuat kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

Kebijakan :

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya penanggulangan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana**Strategi :**

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat

2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

Kebijakan :

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 BPBD Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana dan pasca bencana dan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan

pengecahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi

- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggung jawaban keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Subag Umum
 - b. Subag Keuangan
 - c. Subag Perencanaan Program
3. Bidang-bidang yaitu :
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Mitigasi;
 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi
 2. Seksi Logistik dan Sarana Prasarana
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 1. Seksi Perbaikan dan Pemulihan
 2. Seksi Pembangunan dan Perlindungan

Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2021-2026, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD
Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.
2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan OPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan OPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BPBD Kota Samarinda dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

TABEL TC-30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BPBD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	4	4	4	4	4	4	4	
1	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	-	-	1	0	1	0	1	0	0	
2	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	200	250	300	200	200	200	200	
B	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	3	9	9	2	3	n/a	2	

1	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1	1	1	1	1	n/a	1	
2	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	100	100	100	100	100	35	90	
3	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	20	24	10	15	20	n/a	15	
5	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	2	2	12	2	2	1	1	

6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	5	2	5	10	5	4	5	
7	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	n/a	11	20	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	1	1	2	1	1	1	1	
9	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	70	1000	500	60	70	35	55	
10	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	n/a	1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	n/a	10	59	n/a	n/a	n/a	n/a	

C	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3	3	5	n/a	3	2	3	
1	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
2	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	3800	3500	3000	4000	3800	4800	3500	
4	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3800	3500	1500	4000	3800	4500	3700	

5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	1	1	1	1	1	50	50	
6	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
D	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	2	2	5	n/a	2	2	2	
1	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	2	3	2	3	2	2	2	
2	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	2	1	0	2	2	2	2	

3	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	3	1	1	1	1	
4	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	24	1	1	n/a	1	
6	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	1	2	2	1	1	1	1	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. BPBD Kota Samarinda pun memiliki Tantangan dan Peluang dari beberapa masukan masyarakat kota Samarinda agar selalu meningkatkan indeks ketahanan risiko bencana dalam menuju Kota yang Tangguh akan bencana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

- a. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- d. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- e. Terbatasnya mobil dan/ atau mesin penanggulangan bencana yang masih layak pakai;
- f. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban;
- g. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi;
- h. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk;
- i. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013;
- j. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana;
- k. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- l. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;
- m. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dan Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka presentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Adapun Hambatan, Kelemahan, Masalah serta Ancaman yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda antara lain:

1. Belum terbangunnya Sistem Informasi & Komunikasi Kebencanaan secara terpadu & terintegrasi
2. Masih terbatasnya sarana & prasarana
3. Terbatasnya jumlah personil Tanggap Darurat yang memiliki keterampilan dasar tentang penanggulangan bencana.
4. Kurangnya dana operasional untuk penanganan penanggulangan bencana yang sifatnya skala kecil namun dalam jumlah yang banyak atau sering terjadi.
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis bencana yang beragam.
6. Adanya perubahan Iklim Global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TABEL TC- 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	65	159.368.181,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	65	159.368.181,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	39.368.181,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.368.181,00	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	
4.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000,00	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	6.219.169.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	6.802.180.826,00	
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	36 Orang	5.412.888.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang	36 Orang	5.995.899.826,00	

			Tunjangan ASN					Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	756.281.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	756.281.000,00	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	80 Orang	130.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	80 Orang	130.000.000,00	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 Paket	85.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 Paket	85.000.000,00	
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	45.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	45.000.000,00	

			yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	530.251.667,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	530.251.667,00	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.251.667,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.251.667,00	
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
14.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 Laporan	30.000.000,00	

15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	10.000.000,00	
16.	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	250.000.000,00	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.000.000,00	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	100.000.000,00	

								Umum Kantor yang Disediakan			
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan	722.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan	722.500.000,00	
19.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70.000.000,00	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	112.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	112.500.000,00	

			yang Dipelihara/Direhabilitasi					yang Dipelihara/Direhabilitasi			
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	40.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	40.000.000,00	
B.	Program Penanggulangan Bencana				6.510.000.000,00	Program Penanggulangan Bencana				6.510.000.000,00	
VIII	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	600.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4 Jenis	600.000.000,00	
23.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang	330 Orang	280.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang	330 Orang	280.000.000,00	

			Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
24.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	320.000.000,00	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	320.000.000,00	
IX.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis	4.040.000.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Jenis	4.040.000.000,00	
25.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	280.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	280.000.000,00	
26.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil	1 Laporan	630.000.000,00	Pengendalian Operasi dan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil	1 Laporan	630.000.000,00	

	Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
27.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	550.000.000,00	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	550.000.000,00	
28.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	12 Kegiatan	300.000.000,00	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	12 Kegiatan	300.000.000,00	
29.	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	7 Kawasan	450.000.000,00	Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Samarinda	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	7 Kawasan	450.000.000,00	

			Kesiapsiagaan Bencana					Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
30.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	250.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	250.000.000,00	
31.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	300.000.000,00	
32.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	450.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	450.000.000,00	
33.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	
34.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	100 Keluarga	400.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	100 Keluarga	400.000.000,00	

			Keluarga Tanggap Bencana Alam					Keluarga Tanggap Bencana Alam			
X.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	875.000.000,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Samarinda	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis	875.000.000,00	
35.	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00	
36.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	100.000.000,00	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	100.000.000,00	
37.	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	200.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi	500 Orang	200.000.000,00	

								Per Jenis Kejadian Bencana			
38.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	350.000.000,00	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	350.000.000,00	
39.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	
40.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Kota Samarinda	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	

XI.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis	995.000.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5 Jenis	995.000.000,00	
41.	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	
42.	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	225.000.000,00	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	225.000.000,00	
43.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kota Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	100.000.000,00	
44.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	250.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	250.000.000,00	
45.	Koordinasi Penanganan Pasca	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan	10 Kegiatan	320.000.000,00	Koordinasi Penanganan	Kota Samarinda	Jumlah penyelesaian kegiatan	10 Kegiatan	250.000.000,00	

	Bencana Kabupaten/Kota		pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			Pasca Bencana Kabupaten/Kota		pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			
--	------------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam upaya mensukseskan program dan kegiatan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program yang diarahkan pada peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintahan, dalam upaya meningkatkan hal-hal tersebut di atas, BPBD Kota Samarinda akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Beberapa Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sudah ada masuk tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda melainkan masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda sehingga usulan tersebut kami pindahkan kepada OPD yang bersangkutan.

TABEL TC-32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota Samarinda Tahun 2026**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Tidak Ada Usulan				
2	Tidak Ada Usulan				
3	Tidak Ada Usulan				
4	Tidak Ada Usulan				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6, meliputi :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. Pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Sementara wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah
 - d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala nasional.
- 2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi :
 - a. Jumlah korban
 - b. Kerugian harta benda
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Presiden.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa Perubahan Iklim merupakan hal yang paling ditakuti oleh dunia yang dapat menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis.

Menurut Kepala Negara, dalam satu dekade terakhir ini Indonesia menempati peringkat ketiga teratas di dunia sebagai negara yang paling rawan bencana. Sebagai catatan, pada tahun 2010 jumlah kejadian bencana di Tanah Air adalah sebanyak 1.945 kali dan di tahun 2022 menjadi 3.544. Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana cara kita ingin naik 81% frekuensi bencana alam nya dari tahun 2010 mencapai 1945 bencana. Di tahun 2022 melompat menjadi 3544.

Melihat dari adanya peningkatan kejadian bencana itu, Presiden meminta agar segenap komponen penanggulangan bencana agar selalu siaga dan waspada, baik dalam pra bencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Presiden meminta agar hal itu selalu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Presiden juga meminta segenap unsur pegiat kebencanaan, baik yang di pusat maupun di daerah agar memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPBD Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan ingin dicapai adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Peningkatan kinerja organisasi dalam koridor Good Government.
- c. Peningkatan kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas, membangun system pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. Pelaksanaan penanganan darurat dan logistik secara terencana, terpadu, terkoordinasi, cepat dan tepat.
- e. Pelaksanaan system kaji cepat, dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpadu, terkendali, transparan dan akuntabel dengan dukungan peralatan dan alat memadai

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur, swasta (PMK swasta) dan kelompok masyarakat (tenaga sukarelawan, balakarcana, balakar kota) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan mitigasi adaptasi perubahan iklim (MAPI) guna membangun ketangguhan daerah.

- d. Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana.
- e. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik disbanding sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarus utamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"TERWUJUDNYA LEMBAGA DAN MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA"*** maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Samarinda tahun 2026 terdiri dari:

Adapun rencana program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2026 sebagai berikut:

TABEL TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							Tahun + 1	
				Tahun N					Jumlah (Rp)			
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 4.577.628.797,00	Rp. 2.278.700.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.856.328.997,00	Rp. 6.390.000.000,00			
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 251.515.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 251.515.000,00	Rp. 280.000.000,00		
1	05	03	2.01	0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 251.515.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 251.515.000,00	Rp. 280.000.000,00

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Rp. 2.488.587.997,00	Rp. 404.100.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.892.687.997,00	Rp. 4.210.000.000,00
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 185.381.000,00	Rp. 4.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 189.881.000,00	Rp. 300.000.000,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 125.160.000,00	Rp. 159.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 284.860.000,00	Rp. 550.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 188.390.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 188.390.000,00	Rp. 450.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun N					Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 185.107.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 185.107.000,00	Rp. 400.000.000,00
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 146.331.997,00	Rp. 223.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 369.731.997,00	Rp. 450.000.000,00

1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 90.161.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.161.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 241.104.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 241.104.000,00	Rp. 300.000.000,00
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 263.699.000,00	Rp. 16.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 280.199.000,00	Rp. 600.000.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 821.122.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 821.122.000,00	Rp. 630.000.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 242.132.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 242.132.000,00	Rp. 280.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Rp. 698.600.800,00	Rp. 1.835.700.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.534.301.000,00	Rp. 875.000.000,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 54.450.000,00	Rp. 20.550.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00

1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 73.030.800,00	Rp. 21.750.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 94.781.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 129.095.000,00	Rp. 1.761.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.890.095.000,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 306.096.000,00	Rp. 26.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 332.496.000,00	Rp. 350.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun N					Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 88.325.000,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 94.325.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 47.604.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.604.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Rp. 1.138.925.000,00	Rp. 38.900.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.177.825.000,00	Rp. 1.025.000.000,00

1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 88.026.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 88.026.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 211.939.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 211.939.000,00	Rp. 225.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 95.201.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.201.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 213.748.000,00	Rp. 1.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 215.648.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.011.000,00	Rp. 37.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 237.011.000,00	Rp. 0
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 8.404.727.869,00	Rp. 47.997.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.452.725.369,00	Rp. 8.021.288.848,00

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 256.235.000,00	Rp. 14.775.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 271.010.000,00	Rp. 159.368.181,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 139.698.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 139.698.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.283.000,00	Rp. 14.775.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.058.000,00	Rp. 39.368.181,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.804.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.804.000,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.450.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.450.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 6.809.056.421,00	Rp. 2.650.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.811.706.421,00	Rp. 6.219.169.000,00

1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.995.899.826,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.995.899.826,00	Rp. 5.412.888.000,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 770.546.595,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 770.546.595,00	Rp. 756.281.000,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.610.000,00	Rp. 2.650.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.260.000,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 130.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 85.000.000,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 45.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 196.927.500,00	Rp. 20.572.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 217.500.000,00	Rp. 530.251.667,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.000.000,00

1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.427.500,00	Rp. 20.572.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.251.667,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun N					Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 152.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 152.500.000,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

					Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 437.508.948,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 437.508.948,00	Rp. 250.000.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 279.508.948,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 279.508.948,00	Rp. 150.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 158.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 158.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 605.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 605.000.000,00	Rp. 722.500.000,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 480.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 480.000.000,00	Rp. 500.000.000,00

1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 112.500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 40.000.000,00
Jumlah								Rp. 12.982.356.666,00	Rp. 2.326.697.700,00			p. 15.309.054.366,00	Rp. 14.411.288.848,00

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda			15.114.300.674,00					15.114.300.674,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.114.300.674,00					15.114.300.674,00
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.114.300.674,00					15.114.300.674,00
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.604.300.674,00				-	8.604.300.674,00
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	159.368.181,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	159.368.181,00
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	50.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.368.181,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	39.368.181,00	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	20.000.000,00	
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		50.000.000,00
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.802.180.826,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	6.802.180.826,00
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.995.899.826,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		5.995.899.826,00
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	756.281.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		756.281.000,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		50.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	130.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	130.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	85.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		85.000.000,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		45.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	530.251.667,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	530.251.667,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	15.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	200.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.251.667,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	25.251.667,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	10.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	30.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	250.000.000,00

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	10.000.000,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		10.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	250.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	250.000.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		150.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	722.500.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	722.500.000,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	500.000.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	70.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	112.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	112.500.000,00
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	40.000.000,00
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	6.510.000.000,00			-	6.510.000.000,00
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	600.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	600.000.000,00
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	330 Orang	280.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	280.000.000,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	320.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	320.000.000,00

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	4.040.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4.040.000.000,00
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Kegiatan	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		300.000.000,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		550.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	450.000.000,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	400.000.000,00	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							

						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	450.000.000,00
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	25 Orang	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	250.000.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							

						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	300.000.000,00	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana								
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100.000.000,00	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								

						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	630.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	630.000.000,00
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	330.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	330.000.000,00	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan	280.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		280.000.000,00
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	875.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	875.000.000,00
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		75.000.000,00
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							

						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100.000.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	200.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	350.000.000,00
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit							

						Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000.000,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		50.000.000,00	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	995.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	995.000.000,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								

						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	225.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	225.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100.000.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							

						Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24 Laporan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	250.000.000,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	320.000.000,00
J U M L A H								15.114.300.674,00				15.114.300.674,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 yang memuat tentang rencana pelaksanaan dan aktualisasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan rencana kinerja dari semua program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda selama satu tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada dasar pelaksanaannya mengacu pada visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ***”Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”***.

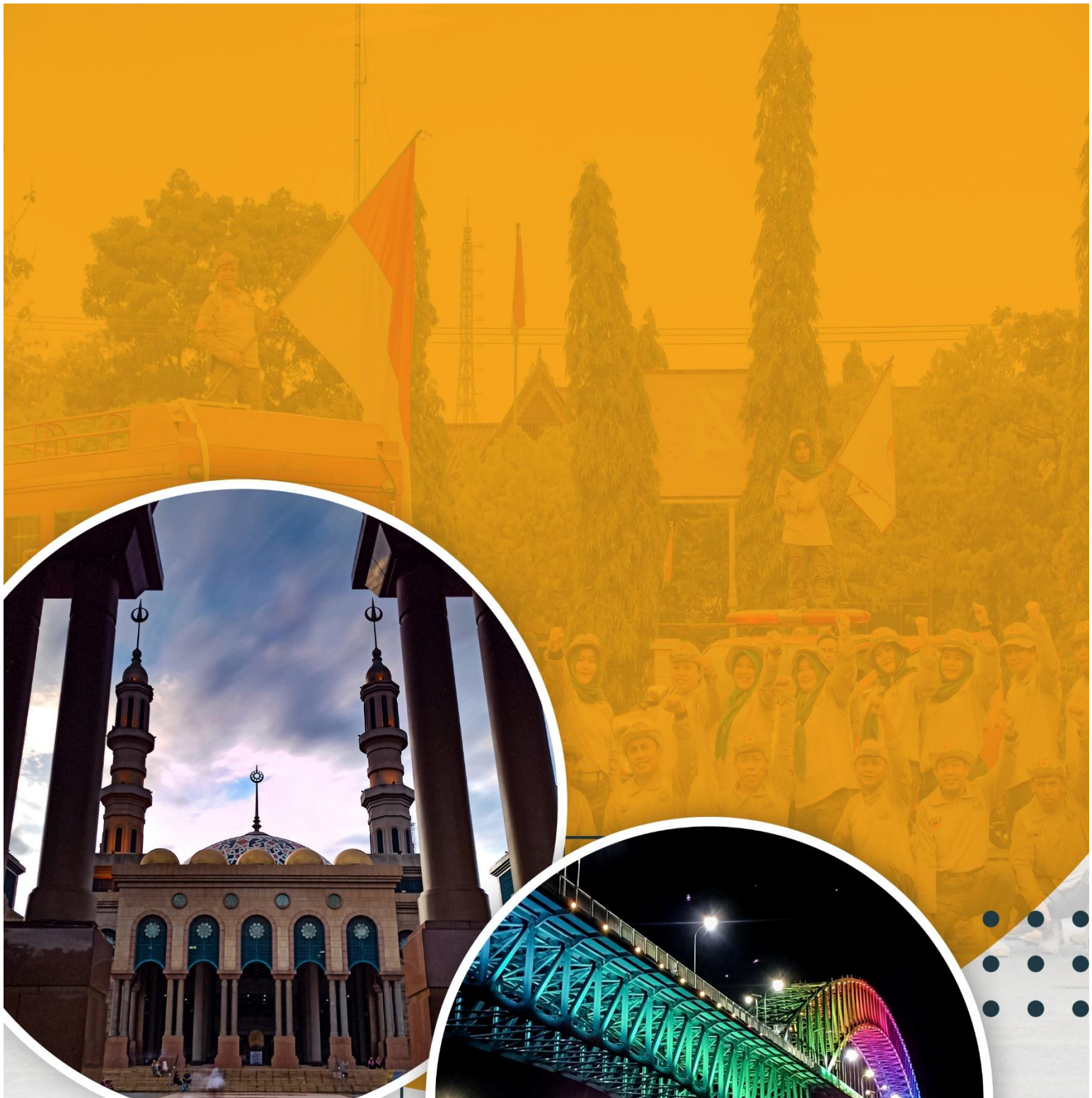
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2026 ini adalah dengan memberikan prioritas kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2026 yang tercakup dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

- 1) Penanganan Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- 2) Penanganan Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)
- 3) Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026.

Samarinda, 01 Juni 2025
Kepala Pelaksana,

SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001



 **SAMARINDA**
Kota Pusat Peradaban

  @BPBDSamarinda

magnificent
SAMARINDA

0811-5537-007 